

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 harus dipertanggungjawabkan secara periodek dalam bentuk Laporan Keuangan. Oleh karena itu, Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk periode 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Tmur. Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Periode 31 Desember 2024 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 31 Desember 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur No 33 Tahun 2023 tentang Aturan atas Perubahan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan infonnasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;

- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312,
Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024; Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024; Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6
- o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024; Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45
- q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024. Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6

1.3 Sistematika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas Pelaporan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD
- 4.2 Laporan Operasional -LO SKPD
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD
- 4.4 Neraca SKPD
- 4.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Bab V Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan Efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA. 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran per 31 Desember 2024, Pendapatan Daerah Terealisasi Sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari target sebesar Rp. 0,00.

Sementara Belanja Daerah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 7,142,007,297.00 terealisasi sebesar Rp. 6,895,189,216.00 atau 96,54 % terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp. 6,787,171,062.00 terealisasi sebesar Rp. 6,544,421,216.00 atau 96,42, belanja modal dari pagu anggaran sebesar Rp. 354,836,235,00 terealisasi sebesar Rp. 350,768,000,00 atau 98,85%. Belanja tak terduga dari Target sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

TABEL REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TOTAL REALISASI	
	Rp	Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>7,142,007,297</i>	<i>6,895,189,216</i>	<i>96.54</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>3,718,773,767</i>	<i>3,606,549,371</i>	<i>96.98</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>50,000,000</i>	<i>49,418,850</i>	<i>98.84</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>15,000,000</i>	<i>14,899,100</i>	<i>99.33</i>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	<i>10,000,000</i>	<i>9,848,850</i>	<i>98.49</i>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>10,000,000</i>	<i>9,686,750</i>	<i>96.87</i>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>15,000,000</i>	<i>14,984,150</i>	<i>99.89</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>3,003,847,514</i>	<i>2,920,871,537</i>	<i>97.24</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>2,935,447,754</i>	<i>2,852,625,487</i>	<i>97</i>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>53,399,760</i>	<i>53,399,400</i>	<i>100</i>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15,000,000	14,846,650	99
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29,998,950	29,218,000	97
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,999,510	9,978,550	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,999,750	9,644,200	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,999,690	9,595,250	96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94,079,630	93,454,510	99
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,999,940	4,835,350	97
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,999,690	9,605,250	96
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79,080,000	79,013,910	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,714,170	203,506,460	98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,984,042	2,980,000	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,958,750	5,950,000	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,985,892	4,930,000	99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,995,866	29,975,000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,000,000	37,000,000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	1,000,000	50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	46,240,000	46,223,700	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,549,620	67,512,760	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	4,935,000	99
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,000,000	3,000,000	60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49,605,235	49,198,000	99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,605,235	49,198,000	99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155,550,000	137,063,790	88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	200,000	13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71,250,000	67,863,790	95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,800,000	69,000,000	83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,978,268	123,818,224	96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74,987,250	72,514,224	97
Pemeliharaan Mebel	2,000,000	2,000,000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,000,000	6,950,000	99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,992,963	29,262,000	98

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,500,000	7,032,000	94
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,498,055	6,060,000	81
Perencanaan	2,367,784,686	2,253,164,733	95
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,805,795,400	1,722,458,620	95
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,388,800,000	1,323,366,740	95
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	98,000,000	96,334,800	98
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	51,000,000	48,243,980	95
Pelaksanaan Konsultasi Publik	30,000,000	26,219,000	87
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	25,000,000	24,247,700	97
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	183,800,000	179,933,120	98
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	31,000,000	29,429,900	95
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	970,000,000	918,958,240	95
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	69,995,400	69,450,000	99
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	69,995,400	69,450,000	99
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	217,000,000	209,343,150	96
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	80,000,000	74,850,000	94
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	60,000,000	58,344,510	97
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77,000,000	76,148,640	99
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	130,000,000	120,298,730	93
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	45,000,000	38,311,480	85
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	85,000,000	81,987,250	96
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	561,989,286	530,706,113	94
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	270,000,000	255,531,653	95
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,720,000	45,094,300	99
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14,280,000	13,404,500	94
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20,000,000	17,050,900	85
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	35,000,000	33,356,053	95

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	40,700,000	40,411,600	99
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14,300,000	12,940,500	90
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20,000,000	18,708,500	94
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80,000,000	74,565,300	93
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	169,999,992	157,767,060	93
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	39,962,697	39,244,400	98
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15,000,000	14,805,000	99
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18,762,297	10,640,000	57
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	25,000,000	24,923,050	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	32,205,559	31,269,860	97
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15,000,000	14,700,500	98
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6,275,000	6,274,950	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	17,794,439	15,909,300	89
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	121,989,294	117,407,400	96
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	39,640,000	36,954,050	93
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14,999,625	14,420,000	96
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10,359,669	10,319,650	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	56,990,000	55,713,700	98
Penelitian dan Pengembangan			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,055,448,844	1,035,475,112	98
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	199,999,665	192,072,550	96.04
Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	199,999,665	192,072,550	96.04

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>705,449,389</i>	<i>694,575,862</i>	98
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	<i>5,450,000</i>	<i>5,290,600</i>	97
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	<i>699,999,389</i>	<i>689,285,262</i>	98
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>149,999,790</i>	<i>148,826,700</i>	99
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>149,999,790</i>	<i>148,826,700</i>	99

2.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian Target Kinerja

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD TA. 2023 masih seperti yang dihadapi pada tahun tahun sebelumnya antara lain adalah :

a. Pendapatan

1. Masih terbatasnya kemampuan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola Pendapatan daerah khususnya PAD;
2. Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
3. Belum semua Potensi pendapatan terkendali dan terdata secara optimal;
4. Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
5. Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;
6. Masih rendahnya kemampuan dan kesadaran sebagai wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
7. Pajak galian C yang obyeknya bersumber dari dana APBN dan APBD masih terdapat kendala dalam hal penghitungan penetapan dan penagihan atas besaran tarif pajak yang harus dikenakan.

b. Belanja

Dengan Kondisi keterbatasan Anggaran TA. 2024 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, yang menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan turut berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah, antara lain:

1. Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan dan juga masih terdapat pekerjaan fisik yang terlambat pelaksanaannya dan berakibat pada penyelesaian tidak tepat waktu.
2. Masih terdapat beberapa kegiatan yang rendah dalam hal penyerapan anggaran;
3. Ada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya sehingga sebagian besar anggaran yang telah disediakan dialihkan ke kegiatan yang lain;
4. Mekanisme beberapa belanja yang dilakukan belum sesuai dengan nomenklatur yang seharusnya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.

3.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember 2024. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

3.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

1. Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui :

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2. Pengukuran Persediaan

a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barangbarang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

b) Persediaan disajikan sebesar :

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

(a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

(b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

(1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

3.3.4 Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah :
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
 - g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
 - h. Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.
 - k. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - l. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - n. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - o. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

a. Pengakuan Aset Tetap

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Tidak mudah rusak;
 - 4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

b. Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

3.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain;

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2024

BAB IV
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Realisasi Anggaran - LRA

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur 31 Desember 2024 dengan basis Akrual yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur 31 Desember 2024 sebagai berikut.

4.1.1 Pendapatan - LRA

Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk 31 Desember 2024 sebesar Rp 0. terdiri dari Retribusi Daerah Rp 0 dan Lain-lain PAD yang sah Rp 0.

Pendapatan:	<u>Anggaran Tahun 2024</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Belanja:	<u>Anggaran Tahun 2024</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
	Rp. 7,142,007,297.00	Rp. 6,895,189,216.00

Penjelasan masing – masing pos realisasi anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut:

- 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
- 4.1.1.2 Pendapatan Transfer
- 4.1.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.1.2 Belanja

<u>Realisasi Tahun 2024</u>	<u>Realisasi Tahun 2023</u>
Rp. 6,895,189,216.00	Rp. 5,301,517,267.00

Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 6,895,189,216.00 dari Anggaran sebesar Rp. 7,142,007,297.00 atau realisasi sebesar 96,54 % yang terdiri dari:

4.1.2.1 Belanja Operasional

Realisasi Tahun 2024

Rp. 6,544,421,216.00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 5,239,549,017.00

Belanja Operasional Periode per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 6,544,421,216.00 dari Anggaran sebesar Rp. 6,787,171,062.00 atau realisasi sebesar 96,42 % dengan rincian sebagai berikut:

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2024

Rp. 2,908,925,487.00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 2,106,836,125.00

Belanja Pegawai Periode per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 2,908,925,487.00 dari Anggaran sebesar Rp. 2,991,747,754.00 atau realisasi sebesar 97,23 % dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel: Rincian Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	2,991,747,754.00	2,908,925,487.00	97,23	2,106,836,125,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,288,577,550.00	2,244,021,775.00	98,05	1,640,731,316.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	646,870,204.00	608,603,712.00	94,08	418,604,809.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN	56,300,000.00	56,300,000.00	100	47,500,000.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai Tahun 2024 Sebesar Rp. 2,908,925,487,00 mengalami kenaikan /penurunan sebesar Rp 8,800,000.00 Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2,106,836,125,00. Realisasi Belanja Pegawai akan dikapitalisasi menambah nilai aset belanja Uang lembur.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun 2024

Rp. 3,635,495,729.00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 3,132,712,892,00

Belanja barang dan jasa Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3,635,495,729.00 dari anggaran sebesar Rp. 3,795,423,308.00 atau terealisasi sebesar 95,79 % dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.2.3. Tabel Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31DESEMBER 2024	%	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,795,423,308,00	3,635,495,729.00	95,79	3,132,712,892.00
5.1.02.01	Belanja Barang	807,427,708.00	790,765,249.00	97,94	645,345,485,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,346,500,600.00	1,246,852,415.00	92,60	1.080,308,345,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	28,500,000.00	28,051,000.00	98,42	115,566,000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,564,995,000.00	1,521,887,065.00	97,25	1,244,623,062,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan /atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ pihak lain/ masyarakat	48,000,000,00	47,940,000,00	99,88	46,870,000.00 -

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3,635,495,729.00 akan dikapitalisasikan menambah Aset Tetap sebesar Rp. 28,332,000 terdiri dari:

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

4.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Tahun 2024

Rp. 350,768,000.00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 61,968,250.00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 350,768,000.00 Atau 98,85 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 354,836,235.00. Mengalami Kenaikan/Penurunan sebesar Rp. 288,799,750.00 Atau 5,72 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA. 2023 Sebesar Rp. 61,968,250.00.

4.1.2.2.1 Belanja Tanah

4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun 2024

Rp. 350,768,000.00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 61,968,250.00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. 350,768,000.00 Atau 98,85 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 354,836,235.00. Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Studio Video dan Film Mengalami Kenaikan sebesar Rp. 3,500,000 adalah Kapitalisasi dari Honor Tim Pangadaan. Dengan Rincian Sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	%	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354,836,235	350,768,000	98,85	61,968,250
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	14,430,000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	14,430,000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	14,430,000,00
5.2.02.05	Belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,200,000.00	4,200,000,00	100	33,311,250
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4,200,000,00	4,200,000.00	100	3,258,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4,200,000.00	4,200,000.00	100	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	3,258,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	30,053,250,00
5.2.02.05.02.0004	Benlanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	23,310,000.00
5.2.02.05.02.0006	Benlanja Modal Alat RT Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	6,743,250.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	93,795,000	90,680,000	96,68	1,000,000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	93,795,000	90,680,000	96,86	1,000,000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	89,910,000	86,880,000	96,63	1,000,000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	3,885,000	3,800,000	97,81	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	256,841,235	255,888,000	99,63	13,227,000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	254,545,200	253,788,200	99,70	11,630,000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	254,545,200	253,788,000	99,70	11,630,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2,296,035	2,100,000	91,46	1,597,000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	2,296,035	2,100,000	91,46	1,597,000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Sebesar Rp. 354,836,235,00 Tidak Menambah Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2024 Namun tercatat sebagai Inventaris Ekstrakomptable dengan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Studio Audio Sebesar Rp. 580.000.00.

4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun 2024

Rp. 0,00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung adalah sebesar Rp. 0,00 dari anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI Per 31 Desember 2024	%	REALISASI 2023
5.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.05	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel diatas Menunjukkan bahwa realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun 2024 mengalami kenaikan/Penurunan sebesar 0,00 % atau sebesar Rp. 0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

4.1.2.2.4 Belanja Jalan irigasi dan Jaringan

4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

4.1.3 Surplus / (Defisit)

Realisasi Tahun 2024

Rp. (6,895,189,216.00)

Realisasi Tahun 2023

Rp. (5,301,517,265.00)

Jumlah sebesar Rp. (6,895,189,216.00) adalah Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 31 Desember 2024. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 6,895,189,216,00 dan Transfer Daeran Rp. 0,00.

4.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Tahun 2024

Rp. 6,895,189,216.00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 5,301,517,267.00

Silpa Tahun 2024 sebesar Rp. (6,895,189,216.00)) apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 5,301,517,267.00 maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,76%.

4.2 Laporan Operasional – LO SKPD

4.2.1 Pendapatan Lo

4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah Lo

4.2.1.2 Pendapatan Transfer

4.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

4.2.2 Beban Lo

31 Desember 2023

Realisasi TA. 2024

Rp. 5,422,505,,869,49

Rp. 6,724,369,052,91

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 5,422,505,869,49 dan 6,724,368,052.91.

Yang terdiri dari:

4.2.2.1 Beban Pegawai LO

31 Desember 2023

Realisasi TA. 2024

Rp. 2,104,336,125,00

Rp. 2,905,425,487,00

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2,104,336,125,00 turun atau naik sebesar Rp. 801,089,362.00 atau 38,07% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 2,905,425,487,00. Beban Pegawai dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.48 Beban Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN / PENURUNAN
5.1.01	Belanja Pegawai	2,905,425,487.00	2,104,336,125.00	-
5.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2,244,021,775.00	1,640,731,316.00	-
5.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	608,603,712	418,604,809	-
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	52,800,000.00	45,000,000.00	-
5.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2,500,000	(2,500,000)

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai – LO, hal ini terjadi dengan Perolehan sebagai berikut:

Tabel.: 5.49 Perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai - LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITALISASI	PERSEDIAN AKHIR	BEBAN 2024
5.1.01	Belanja Pegawai	2,908,925,487				2,905,425,487.00
5.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2,244,021,775.00				2,244,021,775.00

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN 2024
5.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	608,603,712.00				608,603,712.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	56,300,000.00		-		45,000,000

4.2.2.2 Beban Persediaan

31 Desember 2023 Realisasi TA. 2024

Rp. 3,341,050,00 Rp. 0,00

Realisasi Beban persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3,341,050,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0,00. Beban Persediaan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.50 Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2024	KENAIKAN/PENURUNAN	%
	Beban Persediaan	3,341,050	0,00	0	0
	Beban Bahan Pakai Habis	325,000	0,00	0	0
	Perlengkapan Komputer	600,000	0,00	0	0
	Beban Bahan Bakar Minyak	2,416,050	0,00	0	0

Terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut:

Tabel 5.51. Perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2024	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN
	Beban Persediaan	3,341,050	0	0	0	0
	Beban Bahan Pakai Habis	325,000	0	0	0	0
	Perlengkapan Komputer	600,000	0	0	0	0
	Beban Bahan Bakar Minyak	2,416,050	0	0	0	0

4.2.2.2 Beban Barang

31 Desember 2023 Realisasi TA. 2024

Rp. 642,004,435.00 Rp. 770,969,299.00

Realisasi Beban Barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 770,969,299.00 dan Realisasi Tahun 2023 Sebesar Rp. 642,004,435.00, turun atau naik sebesar Rp. 128,964,864.00 Atau SEbesar 20,09 %.

Terdapat perbedaan antara Belanja Barang LRA dan Beban Barang, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut

Tabel: 5.53 Perbedaan antara Belanja Barang LRA dan Beban Barang

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI Tahun 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN 2024
5.1.02.01	BEBAN BARANG	790,765,249.00	645,345,485.00	-		770,969,299.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	790,765,249.00	645,345,485.00			770,389,299.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan - bahan bangunan dan Konstruksi	26,007,000.00	22,316,000.00			1,290,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - bahan Bakar dan Pelumas	47,569,199.00	43,449,135.00			49,985,249.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan - bahan Lainnya	930,000.00	505,000.00			930,000.00
5.1.02.01.01.0013	Bahan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	11,313,000.00	15,089,500.00			11,313,000.00
5.1.02.01.01.0024	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	25,829,500.00	58,494,250.00			26,154,500.00
5.1.02.01.01.0025	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	23,614,500.00	0,00			23,614,500.00
5.1.02.01.01.0026	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	234,579,350.00	228,977,550.00			234,579,350.00
5.1.02.01.01.0027	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	600,000.00	700,000.00			600,000.00
5.1.02.01.01.0029	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	35,470,000.00	32,676,050.00			36,070,000.00
5.1.02.01.01.0030	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4,000,000.00	5,988,000.00			4,000,000.00
5.1.02.01.01.0031	Bahan/ alat Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	2,980,000.00	2,710,000.00			2,980,000.00
5.1.02.01.01.0052	Beban Makan Makanan dan Minuman Rapat	357,649,000.00	209,470,000.00	-	-	357,649,000.00
5.1.02.01.01.0053	Beban Makan makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21,223,700.00	24,970,000.00			21,223,700.00

4.2.2.4 Beban Jasa

31 Desember 2023

Realisasi Tahun 2024

Rp. 1,080,308,345,00

Rp. 1,246,852,415.00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 1,246,852,415.00 Turun/naik sebesar Rp.(166,544,070,00) atau 15,42 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.080,308,345.00.

Beban Jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.54 Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
5.1.02.02	BEBAN JASA	1,080,308,345	1,246,852,415.00	166,544,070.00	15,42
5.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	969,458,345	1,202,222,415.00	232,764,070.00	24,01
5.1.02.02.05	Beban Sewa gedung dan Bangunan	10,850,000.00	30,770,000.00	19,920,000.00	183,59
5.1.02.02.09	Beban jasa Konsultasi Konstruksi	100,000,000.00	0,00	(100,000,000.00)	(1000)
5.1.02.02.13	Beban Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Bimbingan dan Pelatihan	0,00	13,860,000.00	13,860,000.00	100,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut:

Tabel: 5.55 Perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALI-SASI 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITA-LISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN 2024
5.1.02.02	BEBAN JASA	1,246,852,415.00	1,080,308,345.00	-	-	1,246,852,415.00
5.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1,202,222,415.00	969,458,345.00	-	-	1,202,222,415.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	17,950,000.00	10,770,000	-	-	17,950,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	639,655,000.00	560,075,000.00			639,655,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5,700,000.00	0,00			5,700,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69,000,000.00	97,600,000.00			69,000,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa juri Perlombaa/Pertandingan	15,750,000.00	5,250,000.00			15,750,000.00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta	532,000,00	0,00			

	AlatRumah tangga					532,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan listrik	49,735,500.00	22,237,000.00			49,735,500.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Langanan Jurnal /Surat Kabar/Majalah	1,000,000.00	0,00			1,000,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimail/Inter nat/TV Berlanganan	20,132,890.00	19,944,130.00			20,132,890.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5,646,025.00	6,298,115.00			5,646,025.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	377,121,000.00	247,248,100.00			377,121,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30,770,000.00	10,850,000.00			30,770,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30,770,000.00	10,850,000.00			30,770,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Kinsultansi Non Konstruksi	0,00	100,000,000.00			0.00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Kinsultansi Berorentasi Bidang Kesehatan	0,00	100,000,000.00			0,00
5.1.02.02.13	Beban Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Bimbingan dan Pelatihan	13,860,000.00	0,00			13,860,000.00
5.1.02.02.13.0003	Belanja Bimbingan Teknis	13,860,000.00	0,00			13,860,000.00

4.2.2.5 Beban Barang yang diserahkan

31Desember 2023

Realisasi Tahun 2024

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Realisasi beban barang yang diserahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 tidak Mengalami kenaikan/penurunan atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Beban barang yang diserahkan dirinci sebagai berikut:

Tabel: 5.56 Beban Barang yang diserahkan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Beban Barang yang diserahkan	-	-	-	-
	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-	-	-

Terdapat perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa. Hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut:

Tabel: 5.57 Perbedaan anrata Belanja Barang yang Diserahkan LRA dan Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN 2024
	Beban Barang Yang Diserahkan	-	-	-	-	-
	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-	-	-	-

4.2.2.6 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023

Realisasi Tahun 2024

Rp. 115,566,600.00

Rp. 23,436,000.00

Realisasi Beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23,436,000.00 . Mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (92,130,000.00) atau (79,72) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 115,566,000.00. Beban barang yang diserahkan dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.58. Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
5.1.02.03	Beban Pemeliharaan	23,436,000.00	115,566,000.00	(92,130,000.00)	79,72
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,436,000.00	11,895,000.00	11,541,000.00	97,02
5.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7,986,000.00	6,865,000.00	1,121,000.00	16,33
5.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mebel	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	100
5.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	6,500,000.00	135,000.00	6,365,000.00	4.714,81
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Personal Komputer	4,850,000.00	4,895,000.00	(45,000.00)	(0,92)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer – Peralatan Komputer – Peralatan Komputer Lainnya	2,100,000.00	0,00	2,100,000.00	100
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	103,671,000.00	(103,671,000.00)	100
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor	0,00	103,671,000.00	(103,671,000.00)	100

Terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut:

Tabel 5.59 Perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN 2024
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	28,051,000.00	115,566,000.00	-	-	23,436,000.00
8.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,436,000.00	11,895,000.00			23,436,000.00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7,986,000.00	6,865,000.00	-	-	7,986,000.00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mebel	2,000,000.00	0,00			2,000,000.00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	6,500,000.00	135,000.00			6,500,000.00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Personal Komputer	4,850,000.00	4,895,000.00			4,850,000.00
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer – Peralatan Komputer – Peralatan Komputer Lainnya	2,100,000.00	0,00			2,100,000.00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,615,000.00	103,671,000.00			0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor	4,615,000.00	103,671,000.00			0,00

4.2.2.7 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023

Rp. 1,244,623,062.00

Realisasi Tahun 2024

Rp. 1,521,887,065.00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1,521,887,065.00

turun/naik sebesar Rp. 277,264,003.00 atau 22,28 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1,244,623,062.00. Beban Perjalanan Dinas diricikan sebagai berikut:

Tabel 5.60 Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 2024	REALISASI 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
5.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	1,521,887,065.00	1,244,623,062	277,264,003.00	22,28
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,521,887,065.00	1,244,623,062	277,264,003.00	22,28
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,410,067,065.00	1,238,603,062	171,464,003.00	13,84
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	111,820,000.00	6,020,000.00	105,800,000.00	1,757,48

Terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO . Hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut:

Tabel 5.61 Perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI 2024	PERSEDIAAN AWAL	KAPITA-LISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN 2024
5.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	1,521,887,065.00	1,244,623,062	-	-	1,521,887,065.00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,521,887,065.00	1,244,623,062	-	-	1,521,887,065.00
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,410,067,065.00	1,238,603,062			1,410,067,065.00
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	111,820,000.00	6,020,000.00	-	-	111,820,000.00

4.2.2.8 Beban Hibah

31 Desember 2023

Rp. 0,00

Realisasi Tahun 2023

Rp. 0,00

Realisasi Beban Hibah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Beben Hibah dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.61 Beban Hibah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
9.1.5.03	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah/BUMD	-	-	-	-
9.1.5.04	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
9.1.5.05	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-
9.1.5.06	Beban Hibah Uang kepada Masyarakat	-	-	-	-

4.2.2.9 Beban Bantuan Sosial**4.2.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 naik sebesar Rp. 0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0,00.

4.2.2.11 Beban Penyisihan Piutang**4.2.2.12 Beban Lain – Lain**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Realisasi Beban Lain – lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 naik sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Beban Lain-lain dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.63 Beban Lain – Lain

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
9.1.8	BEBAN LAIN - LAIN	-	-	-	-
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
9.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-
9.1.9.03	Beban Lain - Lain	-	-	-	-

Nilai tersebut adalah reklafikasi belanja aset tetap ke Ekstrakompatabel.

4.2.2.13 Beban Tranfer Hasil Bagi Pajak Daerah**4.2.2.14 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa****4.2.2.15 Beban Bantuan Keuangan Lainnya**

4.2.3 Surplus / Defisit Operasional

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. 5,422,505,869,49	Rp. 6,724,369,052,91

Adalah jumlah surplus/defisit operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5,422,505,869,49 dan 2024 Rp. 724,369,052,91.

4.2.4 Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Adalah Jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2024 sebesar 0,00.

4.2.5 Pos Luar Biasa

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2024 Rp. 0,00

4.2.6 Surplus/Deficit Dari Pos Luar Biasa

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. 0,00	Rp . 0,00

4.2.7 Surplus/Defisit Lo

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi Tahun 2024</u>
Rp. (5,422,505,869,49)	Rp. 6,724,369,052,91

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan –LO dan Beban-Lo selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/deficit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas - LPE SKPD

4.3.1 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp. 4,836,120,242,60 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/deficit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas Awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2024 (Audited) dengan penjelasan sebagai berikut:

Ekuitas Awal: Rp. 4,821,493,079,51

Surplus/defisit LO

Penyajian nominal Surplus/defisit LO berasal dari Laporan Operasional LO yang perhitungannya adalah pendapatan dikurangi total beban, Surplus/deficit LO tahun 2023 sebesar Rp. 5,422,505,869,49

2. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| a. Koreksi Nilai Persediaan | Rp. 0,00 |
| b. Selisih revaluasi asset sebesar | Rp. 0,00 |
| c. Koreksi ekuitas sebesar | Rp. 0,00 |
| d. Kewajiban untuk dikonsolidasi | Rp. 0,00 |

Selis Revaluasi asset dapat diuraikan sebagai berikut:

Berkurangnya asset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0,00 dan berkurangnya peralatan mesin sebesar Rp. 0,00

4.4. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Mengambarkan Aset. Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan Desember 2023 disajikan lebih lanjut sebagai beriku

4.4.1 ASET

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 4,835,120,242,33	Rp. 4,821,493,079,24

Saldo Aset Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 4,835,120,242,33 DAN Realisasi Tahun 2023 Sebesar Rp. 4,821,493,079,24

4.4.1.1 ASET LANCAR

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 0,00	Rp. 3,341,050.00

Saldo Aset Lancar Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah per 31 Desember 2024 tercatat Rp. 0,00 yang meliputi kas dan setara kas, Inventasi jangka pendek, piutang dan persediaan

4.4.1.1.1 Kas di kas Daerah

4.4.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo per 31 Desember 2024 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp. 0.00 terdiri dari:

1. Sisa UP sebesar	Rp. 0,00
2. Sisa TU sebesar	Rp. 0,00
3. Jasa Giro sebesar	Rp. 0,00
4. Pajak restoran sebesar	Rp. 0,00
5. Perhitungan Pihak ketiga sebesar	Rp. 0,00

4.4.1.1.3. Kas di Bendahara FKTP

4.4.1.1.4. Kas di Bendahara Dana Bos

4.4.1.1.5. Piutang Pajak

4.4.1.1.6. Piutang Retribusi

4.4.1.1.7. Piutang Lainnya

4.4.1.1.8. Penyisian Piutang

4.4.1.1.9. Persediaan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja tahun 2024 serta sisa persediaan tahun sebelumnya. Adapun rincian persediaan menurut jenis barang habis pakai sebagai berikut:

Tabel Persediaan

NO	NAMA JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Kertas HVS F4 e/f 70 gram	rim	0	0	0
2	Kertas HVS A4 e/f 70 gram	rim	0	0	0
3	Tinta DP 40	dos	0	0	0
4	Tinta DP 41	dos	0	0	0
5	Amplop Putih Panjang	dos	0	0	0
6	Buku Agenda Surat	Buah	0	0	0
7	Map Teka	Buah	0	0	0

8	BBM	Liter	0	0	0
9	Materai	Keping	0	0	0
	Total				0

4.4.1.2. INVENTARIS JANGKA PANJANG

4.4.1.3. ASET TETAP

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 4,835,120,242,33	Rp. 4,818,152,029,24

Saldo Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah per 31 Desember 2024 Realisasi Rp. 4,835,120,242,33 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 4,818,152,029,24 .

4.4.1.3.1. Tanah

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 494.700.000	Rp. 494.700.000

Saldo aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 tercatat sebesar Rp. 494.700.000 . Dengan rincian sebagai berikut:

TANAH	SALDO 2021	SOLDO 2020	KENAIKAN ATAU PENURUNAN	TREND
Tanah	494.700.000	494.700.00	0,00	
Tanah untuk bangunan gedung			0,00	
Tanah untuk bangunan bukan gedung			0,00	
Tanah persil	494.700.000	494.700.000	0,00	
JUMLAH		494.700.000	0,00	

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tanah

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	494.700.00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Modal atau Pembalian	0,00	0,00	0,00
Kompilasi Balanja barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Extrakomptable	0,00	0,00	0,00
Pindah antar akun	0,00	0,00	0,00
Pindah antar Aset	0,00	0,00	0,00
Pindah antar enititas	0,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00	0,00
Hasil Sensus	0,00	0,00	0,00
Tindak Lanjut LHP	0,00	0,00	0,00
Reklas dari ekstrakompobable (TLHP)	0,00	0,00	0,00
Reklas ke Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00
Mutasi +/-	0,00	0,00	0,00
SALDO AKHIR	494.700.000	0,00	0,00

4.4.1.3.2. PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2024

Realisasi TA. 2023

Rp. 1,893,410,433.00

Rp. 1,696,915,433,00

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1,893,410,433.00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 1,632,447,183,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.3.1.3.2.1. Tabel Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	PERALATAN DAN MESIN	SALDO 2024	SOLDO 2023	KENAIKAN ATAU PENURUNAN
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1,893,410,433	1,696,915,433	196,495,000.00

KODE REKENING	PERALATAN DAN MESIN	SALDO 2024	SOLDO 2023	KENAIKAN ATAU PENURUNAN
1.3.02.02	Alat Angkutan	835,291,250	835,291,250	-
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	461,848,350	457,648,350	4,200,000.00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	93,318,154	20,418,154	72,900,000.00
1.3.02.10	Komputer	502,952,679	383,557,679	119,395,000.00

4.4.1.3.2.2. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN
Saldo Awal	1,893,410,433.00	1,696,915,433,00	196,495,000.00
Realisasi belanja modal / Pembelian	350,768,000.00	61,968,250.00	288,799,750.00
Kapitalisasi belanja barang dan jasa	3,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00
Ekstrakomptable	26,302,500.00	25.722,500.00	580,000.00
Pindah antar akun	86,880,000.00	0	86,880,000.00
Pindah antar aset	0	0	0
Pindah antar entitas	157,193,000.00	0	157,193,000.00
Hibah	0	0	
Hasil Sensus	0	0	
Tindak lanjut LHP (TLHP)	0	0	
Reklas ke aset lain-lain	0	0	
Persediaan	0	3,341,050.00	(3,341,050.00)
Jumlah			
Mutasi +/-			

Saldo akhir	1,632,447,183		

4.4.1.3.2.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023
 Rp. 4,571,907,868 Rp. 4,543,575,868

Saldo aset tetap – gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 4,571,907,868 dan Tahun 2023 Sebesar Rp. 4,543,575,868 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

PERALATAN DAN MESIN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	4,571,907,868	4,543,575,868	
Saldo Awal	4,571,907,868	4,543,575,868	
Realisasi belanja modal / Pembelian	0	0	
Kapitalisasi belanja barang dan jasa	0	0	
Ekstrakomptable	0	0	
Pindah antar akun	0	0	
Pindah antar aset	0	0	
Pindah anrat entitas	0	0	
Hibah	0	0	
Hasil Sensus	0	0	
Tindak lanjut LHP (TLHP)	0	0	
Reklas ke aset lain-lain	0	0	
Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	
Mutasi +/-	0	0	
Saldo akhir	4,571,907,868	4,543,575,868	

4.4.1.3.2.4. Jalan Irigasi dan Bangunan

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023
 Rp. 242,250,000 Rp. 242.250.000

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 242,250,000 dan Realisasi Tahun 2023 Rp. 242.250.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	SALDO 2024	SOLDO 2023	KENAIKAN ATAU PENURUNAN
1. Jalan dan jembatan	0	0	0
2. Bangunan Air/Irigasi	0	0	0
3. Instalasi	40.000.000	40.000.000	
4. Jaringan	202.250.000	202.250.000	
Jumlah	242.250.00	242.250.00	

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tetap Irigasi dan Jaringan

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	242.250.00	242.250.00	
Realisasi belanja modal / Pembelian	0	0	0
Kapitalisasi belanja barang dan jasa	0	0	0
Ekstrakomptable	0	0	0
Pindah antar akun	0	0	0
Pindah antar aset	0	0	0
Pindah antar entitas	0	0	0
Hibah	0	0	0
Hasil Sensus	0	0	0
Tindak lanjut LHP (TLHP)	0	0	0
Reklas ke aset lain-lain	0	0	0
Persediaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Mutasi +/-	0	0	0
Saldo akhir	242.250.00	242.250.00	0

4.4.1.3.2.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024

Realisasi TA. 2023

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP LAINNYA	SALDO 2021	SOLDO 2020	KENAIKAN ATAU PENURUNAN
1. Buku dan Perpustakaan	0	0	0
2. Barang bercorak kebudayaan	0	0	0
3. Hewan dan ternak beserta Tanaman	0	0	0
4. aset renovasi	0	0	0
JUMLAH	0	0	0

Mutasi aset tetap- Aset tetap lainnya dapat di rincikan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset - Aset Tetap lainnya

ASET TETAP LAINNYA	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	0	0	0
Saldo Awal	0	0	0
Realisasi belanja modal / Pembelian	0	0	0
Kapitalisasi belanja barang dan jasa	0	0	0
Ekstrakomptable	0	0	0
Pindah antar akun	0	0	0
Pindah antar aset	0	0	0
Pindah anrat entitas	0	0	0
Hibah	0	0	0
Hasil Sensus	0	0	0
Tindak lanjut LHP (TLHP)	0	0	0
Reklas ke aset lain-lain	0	0	0
Persediaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Mutasi +/-	0	0	0

ASET TETAP LAINNYA	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
Saldo akhir	0	0	0
	0	0	0

4.4.1.3.2.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Saldo aset tetap - Konstruksi dalam pekerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

4.4.1.3.2.7. AKUMULASI PENYUSUTAN

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023

Rp. 2,367,148,058,67

Rp. 2,159,289,271.76

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 2,367,148,058,67 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2,159,289,271.76 perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel Akumulasi Penyusutan

AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN ATAU PENURUNAN
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,674,403,271,93	1,558,868,500.93	115,534,771
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	629,478,120.07	545,229,104.16	84,249,016.54
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Jaringan Irigasi Jalan	63,266,666.67	55,191,666.67	8,075,000

Nilai Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp. 1,674,403,271,93, merupakan saldo akhir tahun 2024.

4.4.2. DANA CADANGAN

4.4.3. ASET LAINNYA

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023

Rp. (9,610,000) Rp.(54,105,000)

Saldo akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (9,610,000) dan 2023 sebesar Rp. .(54,105,000)

4.4.4. KEWAJIBAN

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

4.4.4.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang perhitungan pihak ketiga

31 Desember 2024 Realisasi TA. 2023

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Saldo hutang perhitungan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan 0,00

Tabel Perhitungan Pihak Ketiga

NO	URAIAN	SALDO 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO 2023 UNAUDITED
1	PPh 21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPh22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PPh23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PPh pasal4(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

- a. Utang Bunga
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- c. Pendapatan diterima di muka
- d. Utang Beban

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo hutang beban lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Terdiri dari utang beban pegawai sebesarRp. 0,00 Dan utang barang dan jasa sebesar Rp. 0,00

- e. Hutang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

4.4.4.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00

4.4.4. 3 EKUITAS

<u>31 Desember 2024</u>	<u>Realisasi TA. 2023</u>
Rp. 5,408,878,706.40	Rp. 5,422,505,869,49

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5,408,878,706.40 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5,422,505,869,49 . Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban berdasarkan basis Akrual nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan Informasi tentang penjelasan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Keuangan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Calk adalah Penyajian Informasi yang dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk disusun dan disajikan dengan basis AkruaI.

BAB V

INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) merupakan Badan/Dinas/Kantor yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di: Jln. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056.

BP4D adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BP4D mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, BP4D mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Pengoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJPD dan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, pelaksanaan kesepakatan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD, sinergitas dan harmoni kegiatan perangkat daerah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten.
2. Penyusunan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
4. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
5. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
6. Pengelolaan Administrasi Badan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun tugas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintah yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan sosial budaya, manusia, masyarakat dan pemerintah serta penelitian dan pengembangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPPPD memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPPPPD Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2024 sejumlah 24 orang, yang terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering, Tahun 2024

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN					JUMLAH
		S M P	S M A	DIPLOMA	S1	S2	
1	II					1	1
2	III	0	0	0	1	3	4
3	IV		0	1	1	0	2
4	Fungsional	0	0	0	9	1	10
5	Non Eselon		5	0	0		5
A	Jumlah PNS	0	5	1	11	5	22
1	Ahli Utama						0
2	Ahli Madya						0
3	Ahli Muda						0
4	Ahli Pratama				0	0	0
	Peneliti				2	0	2
	Analisis Kebijakan				0	2	2
	Perencana			2	4	0	6
5	Pranata Komputer Trampil			0	0	0	0
B	Jumlah PPPK	0	0	2	6	2	10
C	Honoror		5	0	0		6
	Total Pegawai	0	10	3	17	7	38

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 5.2
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN				Jumlah PNS	PPPK	Honoror
		I	II	III	IV			
1	S2	0	0	1	4	5	2	0
2	S1	0	0	11	1	12	6	0
3	Diploma	0	0	2	0	2	2	0
4	SMA	0	5	0		5		5
5	SMP	0	0			0		0

6	SD	0	0			0		1
	Jumlah Pegawai	0	5	14	5	24	10	6

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 5.3
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	PNS_ Laki Laki	0	2	0	6	3	11
2	PNS_ Perempuan	0	3	1	5	2	11
	Jumlah PNS	0	5	1	11	5	22
1	PPPK_ Laki laki	0	0	1	5	1	7
2	PPPK_ Perempuan	0	0	1	1	1	3
	Jumlah PPPK	0	0	2	6		10
1	Honorer_ Laki Laki	0	3	0	0	0	3
2	Honorer_ Perempuan	0	3	0	0	0	3
	Jumlah Honorer	0	6	0	0	0	6
	Total Pegawai	0	11	3	17	5	38

BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) periode 31 Desember 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum rencana-rencana strategis yang ditetapkan telah dapat dipenuhi, berbagai keberhasilan yang telah berhasil diraih akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan, sedangkan hambatan dan rintangan yang ditemui akan dijadikan pengalaman berharga untuk peningkatan kinerja kedepan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah BP4D periode 31 Desember 2024 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di periode berikutnya.

Larantuka, Desember 2024

**Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,**

Apolonia Corebima, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

